

# EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENGGUNAKAN METODE *RAPPOVERTY*

(*Evaluation of Poverty Alleviation Programs Using The Rappoverty Method*)

Nafiah Ariyani\*, Akhmad Fauzi\*\*, Bambang Juanda\*\*\*, Irfan Syauqi Beik\*\*\*\*

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\* Institut Pertanian Bogor (IPB), Jl. Raya Darmaga, Bogor  
Email: arienafiah@gmail.com, fauziakhmad@gmail.com, bbjuanda@yahoo.com, qibeiktop@yahoo.com.

Naskah diterima: 19 Agustus 2015  
Naskah direvisi: 07 November 2015  
Naskah diterbitkan: 30 Desember 2015

## Abstract

Although various methods of evaluating poverty alleviation program have been applied, most of them are qualitative in nature, basing its assessment only on a single criterion and focusing on a particular program and region. Considering the multi-dimensional and multi-criteria nature of poverty alleviation program, the use of a single evaluation method will only hamper its effectiveness. This research proposes a new approach to evaluating poverty alleviation program by using the Rappoverty technique based on Multidimensional Scaling (MDS) and Multi-Attribute Utility Theory (MAUT). This approach is not merely related to the multi-dimensional and multi-criteria aspects of poverty alleviation program. It also has something to do with determining the leverage factor of the program. The data for analysis are obtained through survey, interviews with poverty analysts, managers, and beneficiaries of poverty alleviation program, as well as observation of poverty data and other sources. Findings of the research suggest that differences of programs, suitability of programs to the needs of targeted communities, accuracy of the data of potential beneficiaries, management cost, target identification mechanisms, organization's practicality, cross-institution coordination, the presence of public institutions, and number of beneficiaries are some of the factors that serve as leverage to the sustainability of a poverty alleviation program. The research also shows that zakat (alms giving)-based poverty alleviation programs are programs with the best sustainability status. Keywords: poverty alleviation program, Rappoverty, sustainability status, leverage factors

## Abstrak

Meskipun berbagai metode untuk menilai kinerja program pengentasan kemiskinan telah diterapkan, namun sebagian besar penilaian yang ada umumnya bersifat kualitatif, mendasarkan penilaian pada kriteria tunggal, dan berfokus pada program tertentu atau di daerah tertentu saja. Mengingat program pengentasan kemiskinan meliputi banyak dimensi dan kriteria guna menghadapi kemiskinan yang multidimensional, maka menggunakan penilaian tunggal akan menghambat efektivitas evaluasi program itu sendiri. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dalam mengevaluasi program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan teknik *Rappoverty* berdasarkan skala multi-dimensi (MDS) dan teknik utilitas multi atribut (MAUT). Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek multidimensi kriteria pengentasan kemiskinan, tetapi juga menetapkan faktor pengungkit program pengentasan kemiskinan. Kriteria dan data untuk analisis diperoleh melalui metode *world cafe*, wawancara dengan pemerhati kemiskinan, pengelola, dan penerima program, serta observasi terhadap data-data kemiskinan dan sumber-sumber lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor perbedaan antarprogram, ketepatan program dengan kebutuhan masyarakat sasaran, keakuratan data calon penerima program, biaya manajemen, mekanisme penentuan target, kepraktisan organisasi, koordinasi antarlembaga, keberadaan lembaga-lembaga publik serta jumlah penerima manfaat program adalah faktor-faktor yang berperan sebagai pengungkit status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Artinya jika di antara salah satu faktor-faktor ini dihilangkan maka akan berdampak pada status keberlanjutan program. Penelitian ini juga menunjukkan hasil evaluasi terhadap status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan menyatakan bahwa program-program berbasis zakat adalah program dengan status keberlanjutan terbaik. Kata kunci: program pengentasan kemiskinan, *Rappoverty*, status keberlanjutan, faktor pengungkit

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan, suatu etik dalam pembangunan yang menggambarkan seperangkat prinsip dan pandangan yang berorientasi pada masa depan tidak dapat dipungkiri telah menjadi isu yang meluas di seluruh dunia. Namun, pembahasannya yang cenderung berfokus pada aspek lingkungan dari pembangunan saja, telah mengabaikan sisi lain pembangunan yang sama pentingnya (Hersh, 2006: 2). Kemiskinan adalah sisi lain dari pembangunan yang sering menjadi masalah ekstrim bagi negara maju maupun berkembang dan sangat menyita perhatian.

Berbagai langkah penanggulangan kemiskinan telah dilakukan untuk mencegah bencana sosial ini. Diskusi tentang pola program pengentasan kemiskinan yang efektif juga telah menjadi tema yang *intens* baik di lingkungan akademisi maupun pengelola negara di seluruh dunia, namun nampaknya belum menunjukkan hasil signifikan. Kemiskinan tetap menjadi masalah sosial ekonomi yang paling sulit ditanggulangi sebagaimana dinyatakan oleh Blanden dan Gibsson (2006: 1). Demikian pula pernyataan Dasgupta (2003: 2) bahwa kemiskinan adalah suatu jalur berlumpur berbentuk spiral, ketika seseorang atau suatu keluarga masuk ke jalur itu, maka akan sulit keluar bahkan cenderung merosot ke bawah.

Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan kebijakan komprehensif yang didukung dengan program yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang melintas antargenerasi ini. Melalui program yang berkelanjutan akan menjamin upaya pengentasan kemiskinan berlangsung secara konsisten dan permanen.

Sejalan dengan itu, baru-baru ini telah muncul suatu pandangan di antara para peneliti serta kesadaran dari para pembuat kebijakan terhadap pentingnya dilakukan sinergi antara pemerintah, lembaga-lembaga sosial masyarakat serta perusahaan dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan. Gagasan tersebut menguatkan ide yang pernah ditawarkan oleh Joseph Stiglitz pada Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) pada tahun 1998 yakni perlunya pelibatan masyarakat dan swasta dalam menanggulangi permasalahan sosial ini sebagaimana dinyatakan dalam *Summary Report from the Workshop of Poverty Alleviation and Sustainability Development* (Sell dan Spence, 2001).

Ide sinergi tersebut sejalan dengan konsep model kelembagaan *hybrid*, yang merupakan model kombinasi antara model-model kelembagaan yang berbeda yang telah berhasil diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang kompleks (Williamson, 1991). Salah satu keberhasilan model kelembagaan *hybrid* adalah dapat memfasilitasi terjadinya *collective learning* di antara berbagai institusi untuk berkoordinasi dan bekerjasama serta melahirkan kondisi saling tergantung (*interdependency*) sehingga permasalahan dapat diatasi secara koordinatif dan efektif (Elsner, 2004: 13).

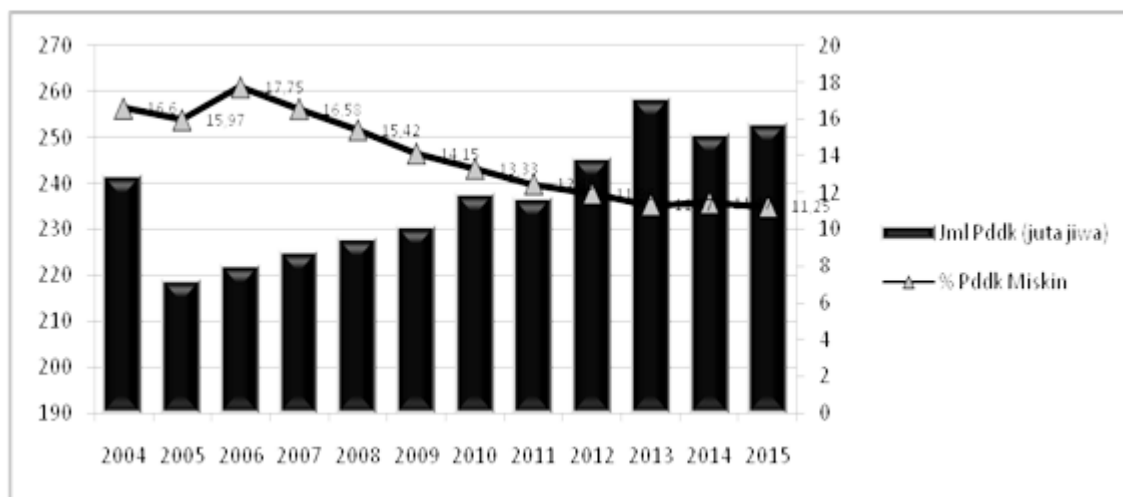
Di Indonesia, untuk menanggulangi kemiskinan yang jumlahnya dari tahun ke tahun tidak berkurang secara signifikan sebagaimana terlihat pada Gambar 1, bahkan pada September 2015 kemiskinan mengalami kenaikan dibanding September 2014 dengan jumlah mencapai lebih dari 11,22 persen dari total penduduk

(atau 28,59 juta jiwa) (BPS, 2015), jelas membutuhkan upaya yang cukup besar. Pengentasan kemiskinan adalah masalah di atas masalah yang rumit (*meta problem*), yang memerlukan kebijakan yang tepat (Dunn, 2003: 227), guna memperbaiki ketidakadilan distribusi, keterbatasan akses dan meningkatkan kemampuan orang miskin agar dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi. Untuk menanggulangi kemiskinan dibutuhkan pelibatan berbagai pihak melalui program-program pengentasan kemiskinan, mulai dari yang sifatnya bantuan sosial sampai yang bersifat pemberdayaan.

## B. Permasalahan

Di negara kita upaya untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan baik oleh pemerintah, lembaga sosial masyarakat (di antaranya lembaga zakat) maupun perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun dikarenakan belum adanya sistem pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, telah mengakibatkan pelaksanaan program-program, khususnya program pemerintah cenderung tidak koordinatif, terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antarprogram, terjadi ego sektoral, tidak terpadu, tidak merata, tidak menyeluruh baik dalam aturan, acuan, kriteria penerima manfaat, maupun pengelolaannya. Bahkan program-program pemerintah dinilai telah memicu konflik struktural maupun konflik horisontal di kalangan masyarakat (Septiana dan Darwis, 2004; Dolles, 2010; Muktasam dan Nurjanah 2011; Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, PSPK UGM, dan *Ford Foundation*, 2014).

Sementara pada program zakat yang diharapkan dapat menjadi program abadi terkait dengan pemenuhan kewajiban agama, juga belum mampu mengatasi kemiskinan secara optimal. Beberapa permasalahan mendasar dihadapi oleh program zakat, yaitu masyarakat lebih suka membayar



Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan situs [www.datastatistik-indonesia.com](http://www.datastatistik-indonesia.com).

**Gambar 1.** Jumlah dan Proporsi Penduduk Miskin Tahun 2004-2015

kewajiban zakatnya secara langsung sehingga mengakibatkan jumlah dana yang dikelola oleh lembaga zakat relatif terbatas. Padahal secara potensial dana zakat cukup besar, yakni mencapai Rp217 triliun per tahun sebagaimana hasil penelitian IPB bersama Baznas tahun 2011. Selain itu, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (hasil wawancara, 2014)<sup>1</sup> dari dana yang terkumpul, hampir 32 persen masih digunakan untuk program karitatif yang cenderung hanya meringankan beban sesaat (*temporary relief*) dan mekanisme *drain distribution* menyebabkan distribusi tidak merata. Terkait dengan keorganisasian zakat nasional yang sangat besar tetapi lemah dalam koordinasi mengakibatkan antarlembaga zakat terkesan saling bersaing dan terjadi tumpang tindih program.

Demikian pula halnya dengan program CSR. Meski telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kesadaran perusahaan yang semakin baik, namun dikarenakan tidak adanya standar baku dalam pelaksanaannya, telah mengakibatkan program CSR sangat variatif, berjangka pendek, dan cenderung mengikuti selera pemilik dana (The Economist, 2008; Mutamimah dan Hartono, 2010). Kemp dalam Simon dan Fredrik (2009) menyatakan bahwa kebanyakan perusahaan di Indonesia menggunakan CSR hanya sebagai strategi untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat agar bisnis dapat beroperasi di area tersebut. Perusahaan-perusahaan telah terjebak dalam situasi *broken windows fallacy*, yang tragisnya hal ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk menekan perusahaan. Akibatnya hubungan masyarakat lokal dengan perusahaan hanya bersifat hubungan transaksional finansial jangka pendek yang tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fauzi, 2012).

Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan tersebut mendorong munculnya kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja program pengentasan kemiskinan secara komprehensif. Meskipun sejatinya, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun studi-studi terdahulu umumnya dilakukan dengan perspektif jangka pendek, mendasarkan evaluasi pada kriteria tunggal, serta berfokus pada tipe program tertentu dari lembaga tunggal atau sekelompok program dalam satu wilayah tertentu. Artinya, penelitian-penelitian tersebut tidak dalam upaya membandingkan antarberbagai program atau antarlembaga sekaligus, akibatnya hasil penelitian cenderung eksklusif, sehingga sulit

dipakai sebagai dasar untuk membangun sistem penanggulangan kemiskinan yang integratif.

Harus diakui bahwa tidak dilakukannya perbandingan dalam mengevaluasi program pengentasan kemiskinan di masa lalu masih dibenarkan, dengan argumen bahwa program-program tersebut merupakan program heterogen dan khas yang tidak mungkin untuk diperbandingkan (*incomparable*). Serangkaian penelitian terdahulu tersebut pada umumnya mengklaim bahwa program pengentasan kemiskinan terlalu berbeda untuk dianggap sebanding. Argumen heterogenitas program terutama terkait dengan misalnya, konteks tujuan yang mendasari; sifat kelembagaan pengelola (terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga sosial masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, berkaitan dengan motif dan pendekatan); sifat dari program (apakah berupa bantuan sosial atau pemberdayaan) maupun komponen program lainnya. Namun dalam studi ini penulis berpendapat bahwa, meskipun terlihat agak sulit, namun membandingkan kinerja program pengentasan kemiskinan tetap memungkinkan untuk dilakukan. Hal itu mengingat bahwa tujuan utama dari setiap program pengentasan kemiskinan siapapun pelaksanaannya adalah sama, yaitu menjamin *livelihood*, meningkatkan kesejahteraan serta melahirkan kemandirian orang miskin.

Terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia, minimal ada beberapa kesamaan kriteria yang dapat diperbandingkan, utamanya dari aspek *input* terkait dengan data, dana, dan kelengkapan program; aspek proses terkait dengan manajemen, waktu yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan, dan biaya pengelolaan; serta aspek *output* terkait dengan ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran dan kemudahan bagi penerima program. Dengan asumsi bahwa terdapat homogenitas yang cukup pada kategori-kategori tersebut, maka sangat memungkinkan untuk mengevaluasi dan membandingkan program-program pengentasan kemiskinan pemerintah, zakat, dan CSR sekaligus. Dengan demikian akan diperoleh informasi yang cukup kuat sebagai dasar dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan integratif yang sangat diperlukan dalam menghadapi kemiskinan yang mempunyai karakter multidimensi dan antargenerasi ini.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, studi ini menerapkan metode *Rappoverty (Rapid Appraisal for Poverty Evaluation)*. *Rappoverty* merupakan salah satu alternatif metode evaluasi untuk mendeteksi status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan serta menentukan faktor *leverage* keberlanjutan program

<sup>1</sup> Wawancara dengan Direktur Pelaksana Baznas, Teten Kustiawan, pada tanggal 2 Juli 2014.

pengentasan kemiskinan. Analisis *Rappoverty* akan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja program pengentasan kemiskinan pada atribut-atribut yang dianalisis yang akan menjadi dasar yang kuat bagi pengambil keputusan dalam merancang model program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, yaitu program yang terjamin keberlanjutannya manfaatnya yang sangat diperlukan dalam menghadapi kemiskinan yang *persistence*.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (a) status keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan pemerintah, zakat, dan CSR dilihat dari aspek *input*, proses, dan *ouput* pengelolaan program dan (b) faktor pengungkit (*leverage factors*) program pengentasan kemiskinan.

## II. KERANGKA TEORI

### A. Kerangka Kebijakan Anti Kemiskinan

Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdaya guna, pengkajian konsep, dan strategi penanganan kemiskinan terus menerus diupayakan dalam rangka menemukan model program yang tepat untuk menangani permasalahan yang *persistence* dan *multidimensional* ini. Menurut Bradshaw (2005) penyusunan kebijakan anti kemiskinan memerlukan kajian komprehensif terhadap berbagai faktor yang menentukan keberlanjutannya yaitu pelaku, proses, evaluasi, dan dasar teori yang relevan.

Kebijakan anti kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam program-programnya. Terhadap hal ini Dasgupta (2003) menyatakan desain program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini: (1) spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus sesuai dengan institusi lokal, (2) relevan dengan permasalahan, (3) didasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat, tidak berdiri sendiri, (4) memahami konsekuensi yang tidak diinginkan, dan (5) berbasis sumber daya lokal. Sementara Chambers, *et al.*, sebagaimana dikutip oleh Muktasam (2011) menyatakan faktor yang menentukan keberhasilan dalam merancang program pengentasan kemiskinan adalah (1) kesadaran terhadap nilai-nilai lokal, (2) pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dan (3) bersifat pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan perancangan program pengentasan kemiskinan adalah (1) pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2) pengabaian nilai-nilai lokal dan bias 'outsiders'; (3) kurangnya partisipasi; (4) pendekatan yang tidak holistik; dan (5) ilusi investasi. Dengan memahami kaidah dalam merancang program penanggulangan

akan dapat dihasilkan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima program.

Lebih mendasar Miller, *et al.*, dalam Bradshaw (2005) menyatakan membantu orang miskin penekanannya adalah kepada penyediaan dukungan dan layanan yang menyeluruh untuk mencapai "swasembada", bagi penerimanya. Oleh karena itu, program anti kemiskinan harus mencakup unsur-unsur yang komprehensif, meliputi faktor-faktor berikut ini: (1) penghasilan dan aset ekonomi; (2) pendidikan dan keterampilan, (3) perumahan dan lingkungan, (4) akses kepada pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lain yang diperlukan, (5) kedekatan hubungan pribadi, jaringan kepada orang lain, dan (6) kemampuan sumber daya pribadi dan kemampuan kepemimpinan.

Menghadapi kemiskinan yang dinamis, Shaffer (2008) menyatakan bahwa selama dekade terakhir terdapat tiga perubahan utama terkait dengan dasar pemikiran dalam mengembangkan upaya pengentasan kemiskinan. *Pertama*, konsep kemiskinan telah meluas dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu kerentanan, ketidaksetaraan, dan hak asasi manusia. *Kedua*, struktur kausal telah meluas mencakup variabel kausal, seperti sosial, politik, budaya, pemaksaan, dan modal lingkungan. *Ketiga*, struktur kausal diperdalam dengan fokus pada arus individu ke dalam dan keluar dari kemiskinan, bukan pada perubahan jumlah kemiskinan dan pada strategi perlindungan sosial terhadap pengurangan kemiskinan.

Agar berhasil, program pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan strategi yang tepat. Menurut Pramanik dalam Hasan (2010) strategi program penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu (a) strategi tidak langsung, yaitu suatu kerangka kebijakan makro untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan, dan (b) strategi langsung, yaitu suatu kerangka kebijakan mikro berupa penyediaan bantuan yang diperlukan oleh penduduk miskin untuk menjamin perolehan akses kredit, perbaikan kondisi kesehatan, dan peningkatan pendidikan. Keterpaduan dua strategi ini akan melahirkan kebijakan anti kemiskinan yang efektif.

Memahami konsep pengentasan kemiskinan sebagaimana tersebut di atas, sangat membantu dalam mengembangkan kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi program pengentasan kemiskinan.

### B. Rapid Appraisal for Poverty Evaluation (Rappoverty)

*Rappoverty* adalah metode evaluasi untuk menentukan status keberlanjutan dan faktor pengungkit (*leverage factors*) program pengentasan kemiskinan. Status keberlanjutan

program pengentasan kemiskinan menggambarkan keberhasilan terpeliharanya efektivitas program dalam rentang waktu yang panjang dan tumbuhnya/berkembangnya kekuatan program dalam memerangi kemiskinan. Sedangkan faktor *leverage* adalah faktor-faktor yang memengaruhi status keberlanjutan program. Analisis *Rappoverty* akan menghasilkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi program pengentasan kemiskinan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

*Rappoverty* merupakan program modifikasi dari *Rapfish* (*Rapid Appraisal for Fisheries*), yang merupakan metode analisis untuk mengetahui *sustainability* perikanan secara *multidisipliner*. *Rapfish* dikembangkan oleh *Fisheries Center*, University of British Columbia, Kanada. Prinsip dasar *Rapfish* adalah (1) merupakan metode penilaian cepat atas status keberlanjutan suatu obyek berdasarkan sejumlah atribut yang mudah di-skoring, (2) atribut-atribut dapat diredefinisi atau diganti sesuai informasi yang tersedia (Pitcher and Preikshot, 2001; Kavanagh and Pitcher, 2004); (3) merupakan metode pengambilan keputusan multi-kriteria berdasar skala multi-dimensi (*Multidimensional Scaling* atau MDS); dan (4) menggunakan metode ordinasi untuk menentukan status keberlanjutan (Fauzi dan Anna, 2005). Dalam operasinya *Rappoverty* menggunakan seluruh prinsip yang ada di *Rapfish* tersebut.

Kekhasan *Rappoverty* sebagai metode evaluasi adalah digunakannya metode ordinasi. Metode ordinasi adalah metode untuk mensimulasikan status terbaik dan terburuk suatu obyek dengan cara menempatkan titik/obyek pada urutan yang terukur yang dijangkar oleh titik-titik referensi berdasarkan skala penilaian *good* dan *bad*. Skala *good* atau 100 persen merupakan nilai terbaik, dan skala *bad* atau 0 persen merupakan nilai terburuk. Teknik ordinasi dilakukan dengan menghitung jarak *eulidian* ( $d$ ) antartitik/obyek dalam ruang berdimensi  $n$ . Adapun cara menghitung nilai  $d$  adalah dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\sqrt{d = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 + \dots} \dots\dots\dots (1)$$

Di mana  $x_i$ ,  $y_i$ , dan  $z_i$  adalah objek yang dianalisis dalam garis euklidius. Konfigurasi atau ordinasi dari suatu obyek kemudian di-*proxy* dengan meregresikan jarak *eulidius* ( $d_{ij}$ ) dari titik  $i$  ke titik  $j$  dengan titik asal  $d_{ij}$  berdasarkan rumus regresi berikut:

$$d_{ij} = a + \beta d_{ij} + \varepsilon; \varepsilon = \text{error} \dots\dots\dots (2)$$

Proses regresi dilakukan dengan menggunakan algoritma ALSCAL yang membuat proses iterasi regresi sedemikian rupa sehingga didapatkan nilai  $\varepsilon$  terkecil. Penggunaan algoritma ALSCAL menurut Kavanagh and Pitcher (2004) dimaksudkan untuk

memaksa agar *intercept* pada persamaan tersebut sama dengan nol ( $a = 0$ ) sehingga persamaan (2) di atas menjadi persamaan (3) berikut:

$$d_{ij} = \beta d_{ij} + \varepsilon \dots\dots\dots (3)$$

Metode ALSCAL akan mengoptimisasi jarak kuadrat (*square distance* =  $d_{ijk}$ ) terhadap data kuadrat (titik asal =  $d_{ijk}$ ) dalam tiga dimensi ( $i, j, k$ ) yang disebut *S-Stress*. *S-stress* berguna untuk mengukur ketepatan konfigurasi dari suatu titik dalam mencerminkan data aslinya (*goodness of fit*). Nilai *stress* yang rendah menunjukkan *good fit*, sementara nilai  $S$  yang tinggi menunjukkan sebaliknya. Nilai *stress* dirumuskan melalui persamaan berikut:

$$\text{Stress} = \sqrt{\sum \frac{1}{m} \frac{ij}{k=1} \frac{\overline{\sum \sum (d_{ijk} - o_{ij})^2}}{\sum o_{ijk}^4}} \dots\dots\dots (4)$$

Penggunaan teknik skala multi-dimensi (MDS) pada *Rappoverty* dimaksudkan untuk melakukan transformasi multidimensi ke dalam dimensi yang lebih sederhana, atau membantu mereduksi data sehingga lebih mudah dikelola. MDS adalah sebuah teknik analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menentukan posisi obyek didasarkan pada kesamaan atau ketidaksamaannya (Groenen, *et al.*, 2004). Jaworska and Anastasova (2009) menyatakan MDS adalah sebuah teknik analisis data dalam bentuk gambar geometrik obyek yang menggambarkan kesamaan atau kemiripan berdasarkan jarak euklidius. Menurut Fauzi dan Anna (2005), MDS adalah teknik analisis data eksploratif melalui kondensasi sejumlah besar data ke peta spasial yang relatif sederhana untuk menggambarkan hubungan penting antarvariabel dalam cara paling ekonomis, dengan keunggulan dapat menangani data nominal atau ordinal; tidak memerlukan normalitas multivariat; dan memberikan hasil yang stabil.

### III. METODOLOGI

#### A. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap 16 unit program pengentasan kemiskinan sebagai sampel dari program pengentasan kemiskinan pemerintah, zakat, dan CSR. Keenam belas program terdiri dari 11 program pemerintah, 3 program zakat, dan 2 program CSR, sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

#### B. Penentuan Atribut Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan

Mengingat sampai saat ini belum ada atribut evaluasi program pengentasan kemiskinan yang diterima secara *universal*, maka atribut penilaian pada penelitian ini mengacu pada hasil *world cafe*. *World cafe* adalah metode diskusi partisipatori, di mana peserta

secara interaktif mendiskusikan permasalahan dalam kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dipandu seorang fasilitator, peserta duduk mengelilingi meja (yang merupakan simulasi sebuah kafe) untuk mendiskusikan, menyampaikan ide-ide dan berbagi pengetahuan tentang kondisi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, parameter keberhasilan program pengentasan kemiskinan, dan pengalaman-pengalaman empiris terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Secara berkala peserta berpindah dari suatu meja ke meja yang baru yang berlangsung dalam lima putaran, cara ini memungkinkan diskusi berlangsung secara silang dan berkembang. Di setiap meja terdapat seorang fasilitator meja yang merangkul seluruh isi percakapan. *World cafe* melibatkan 31 orang peserta yang terdiri dari konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), pengelola lembaga zakat, konsultan CSR, mahasiswa strata 2 dan strata 3 dari berbagai bidang ilmu, serta masyarakat umum pemerhati kemiskinan. Pada sesi akhir, ide-ide utama dan kemungkinan tindak lanjutnya dibahas dan disampaikan dalam forum pleno.

Agar komprehensif, penentuan atribut evaluasi juga didasarkan pada hasil wawancara mendalam dengan pengelola program pengentasan kemiskinan, *review* terhadap hasil penelitian terdahulu, dan *review* terhadap pemikiran para ahli *poverty* di antaranya Shaffer Dasgupta, Miller, *et al.*, serta Pramanik sebagaimana dijelaskan pada bagian teori. Dari berbagai pendekatan tersebut ditetapkan atribut evaluasi mencakup dimensi *input*, proses, dan *output* pengelolaan program sebagai berikut:

- (1) Dimensi *input* terdiri dari 12 atribut, yaitu ketersediaan dan konsistensi penggunaan kriteria penerima, kesederhanaan persyaratan peserta, sumber dana, ketersediaan dana, ketersediaan data, keakuratan data, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sasaran, perbedaan antarprogram, sifat program apakah bantuan sosial atau pemberdayaan, kestabilan regulasi, kapabilitas personil pelaksana, dan pemahaman peserta terhadap program.
- (2) Dimensi proses terdiri dari 12 atribut, yaitu pendekatan perencanaan program yang digunakan, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penentuan sasaran program, ketersediaan dan konsistensi mekanisme penetapan sasaran, tingkat koordinasi antarlembaga, sosialisasi dan edukasi, struktur organisasi, biaya pengelolaan, ketepatan jumlah dana yang disalurkan, ketepatan waktu penyaluran program, adanya evaluasi dan *monitoring*, dan penerapan *good governance*.

- (3) Dimensi *ouput* terdiri 6 atribut, yaitu ketepatan distribusi, ketercapaian target program, peningkatan jumlah penerima program, terbangunnya lembaga masyarakat, kesinambungan program, dan peningkatan kesejahteraan penerima.

### C. Metode Pengumpulan Data

Sebagai metode pengambilan keputusan mutikriteria, metode *Rappoerty* memerlukan data awal dalam bentuk penilaian oleh peneliti terhadap kinerja program. Untuk mendukung proses tersebut, peneliti melakukan *review* terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dengan fokus pada aspek deskripsi program, mekanisme dan pengelolaan program, mekanisme distribusi program, sumber pendanaan, dan hasil program. Peneliti juga melakukan studi literatur dengan melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu.

Untuk memperkuat penilaian, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan pimpinan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selaku koordinator program penanggulangan kemiskinan pemerintah, Konsultan Nasional Program PNPM-Mandiri, Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), *Corporate Secretary Manager* Dompot Dhuafa, Pengurus Majelis Amil Zakat (Maz) Baitussalam, pengelola CSR PT Antam dan pengelola CSR PT Pertamina. Lembaga-lembaga ini masing-masing mewakili pengelola program pengentasan kemiskinan terbesar di tanah air (kecuali Maz Baitussalam yang khusus diteliti untuk mendapatkan gambaran tentang program zakat yang dikelola oleh masyarakat secara langsung). Wawancara juga dilakukan dengan 30 orang penerima program.

Dari data yang cukup beragam kemudian diekstraksi untuk memperoleh gambaran yang lebih aktual tentang pengelolaan dan kinerja program pengentasan kemiskinan. Untuk keperluan analisis, data hasil ekstraksi tersebut kemudian diskoring dan menjadi masukan metode *Rappoerty*.

### D. Metode Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *Rappoerty* melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan skoring terhadap kinerja program pada atribut-atribut yang telah ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria nilai hipotetik baik (*good*) dan buruk (*bad*). Untuk menghindari *monotonic scoring* masing-masing atribut dinilai dengan skala yang berbeda antara 0, 1, 2, 3 (panduan *skoring* tersedia pada Lampiran 2);
2. Melakukan ordinasasi dan menentukan nilai *stress* menggunakan analisis MDS;



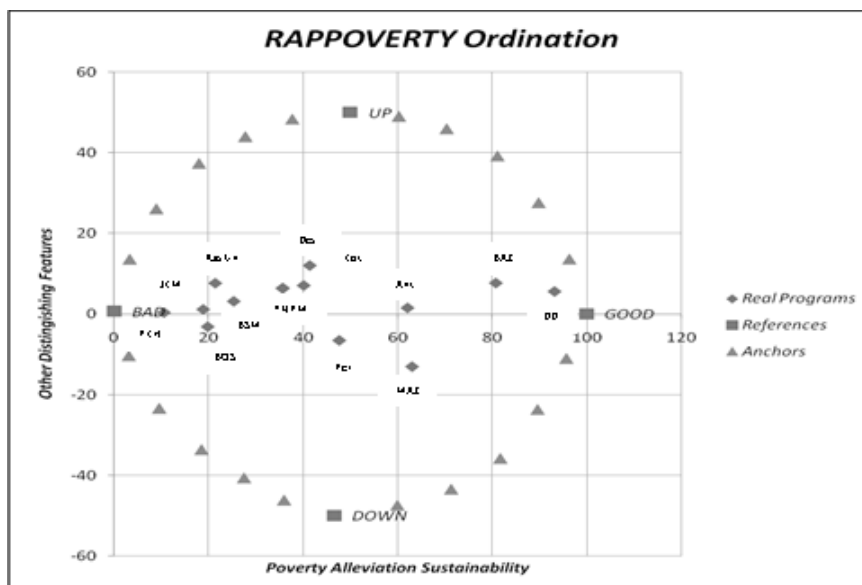
program CSR maupun program pemerintah pada seluruh dimensi.

Gambar 2 menunjukkan status keberlanjutan dari dimensi *input*, bahwa program Zakat Dompot Dhuafa (DD) berada pada posisi *good score sustainability* dalam ordinasinya paling tinggi dibandingkan dengan seluruh program lainnya termasuk di antara program zakat sendiri. Dengan skor sebesar 93,68 program Dompot Dhuafa (DD) dan 81,04 untuk program Baznas (BAZ), status keberlanjutan untuk program Dompot Dhuafa dan program Baznas dapat dikelompokkan dalam ordinasinya baik, sedang program Maz Baitussalam (MAZ) berstatus cukup dengan skor 62,49. Sementara analisis terhadap program pemerintah menunjukkan seluruh program PNPM berada di antara *bad* dan *good* dengan skor 46,20 sampai 49,09 yang berarti kurang berlanjut. Demikian pula pada program bantuan sosial, seluruh program berada di antara *bad* dan *good* dengan skor antara 28,24 sampai 53,82 yang berarti status keberlanjutannya buruk kecuali Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berada pada status kurang berlanjut. Di antara program bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai status keberlanjutan paling rendah sedangkan Program Bantuan Operasi Sekolah (BOS) mempunyai status paling tinggi. Untuk program CSR, baik program CSR Antam (Ant) maupun Pertamina (Per), keduanya berada di antara *bad* dan *good* dengan skor 58,04 dan 66,65 yang berarti cukup berlanjut.

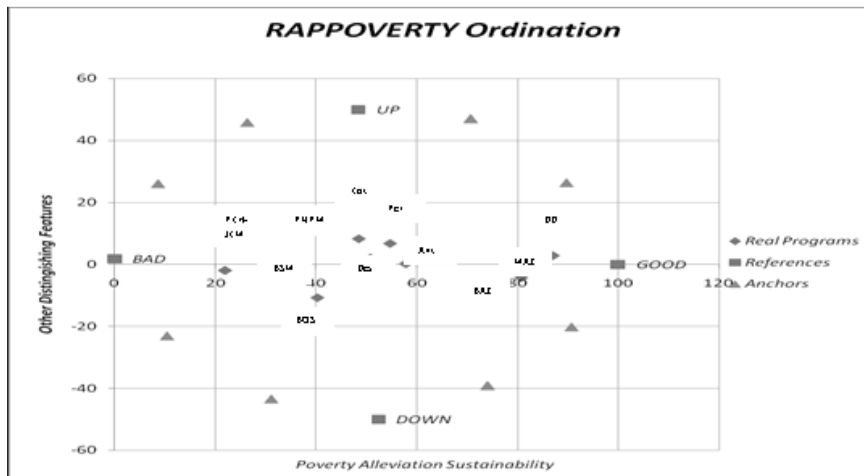
Gambar 3 selanjutnya menggambarkan ordinasinya keberlanjutan program dari sisi proses. Hasil analisis pada dimensi proses menghasilkan indeks keberlanjutan yang bervariasi namun tetap menempatkan program zakat Dompot Dhuafa (DD) pada *good score* dengan status berkelanjutan

paling tinggi dibandingkan dengan program lainnya. Pada dimensi proses, jika analisis difokuskan pada program zakat saja, maka program zakat Dompot Dhuafa (DD) dan program Baznas (BAZ) mempunyai status keberlanjutan baik dengan skor 93,20 dan 80,78. Sedang program Maz Baitussalam (MAZ) mempunyai status cukup dengan skor 63,04. Sementara analisis pada program pemerintah, seluruh program berada di antara *bad score* dan *good score* dengan kecenderungan berada pada posisi *bad*. Pada program pemberdayaan, seluruh program PNPM mempunyai status kurang berlanjut dengan kisaran skor antara 35,65 sampai 41,37, dan PNPM Perkotaan (Kot) mempunyai skor paling tinggi pada kelompok ini. Sedangkan program yang bersifat bantuan sosial seluruhnya mempunyai status keberlanjutan buruk dengan skor antara 10,52 sampai 25,28, dengan Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berada pada status terendah dan program Program Bantuan Operasi Sekolah (BOS) pada status tertinggi. Pada program CSR, meskipun program CSR Antam (Ant) memiliki nilai lebih tinggi dari program CSR Pertamina (Per) namun keduanya berada pada kategori yang sama yaitu di antara *good* dan *bad score* dengan skor 65,30 dan 55,98 yang berarti cukup berlanjut.

Analisis pada dimensi *output* (Gambar 4) menghasilkan keragaman indeks keberlanjutan dengan pola yang tidak jauh berbeda dari dua dimensi sebelumnya. Seluruh program zakat berada pada *good score*, di mana program Dompot Dhuafa (DD) mempunyai skor paling tinggi sebesar 99,98. Pada dimensi ini ada hal yang cukup menarik karena program zakat *Maz Baitussalam* (MAZ) mempunyai skor lebih tinggi dibandingkan dengan program Baznas (BAZ), dengan skor 87,10 sementara program



Gambar 3. Ordinasinya Dimensi Proses



**Gambar 4.** Ordinasasi Dimensi Output

Baznas (BAZ) 80,76. Analisis terhadap program pemerintah menunjukkan bahwa seluruh program pemerintah berada di antara *bad score* dan *good score* dengan nilai berkisar antara 47,25 sampai 54,00 untuk program PNPM dan antara 21,95 sampai 40,31 untuk program bantuan sosial, hanya PNPM Perdesaan (Des) yang mempunyai status cukup berlanjut dengan skor sebesar 54,00. Program bantuan sosial lainnya mempunyai status kurang berlanjut, bahkan program Jamkesmas berada pada status keberlanjutan buruk. Sedangkan pada program CSR kedua program berada di antara *good* dan *bad* dengan skor 57,88 untuk program Antam (Ant) dan 54,74 untuk program Pertamina (Per), sehingga kedua program CSR mempunyai status cukup berlanjut.

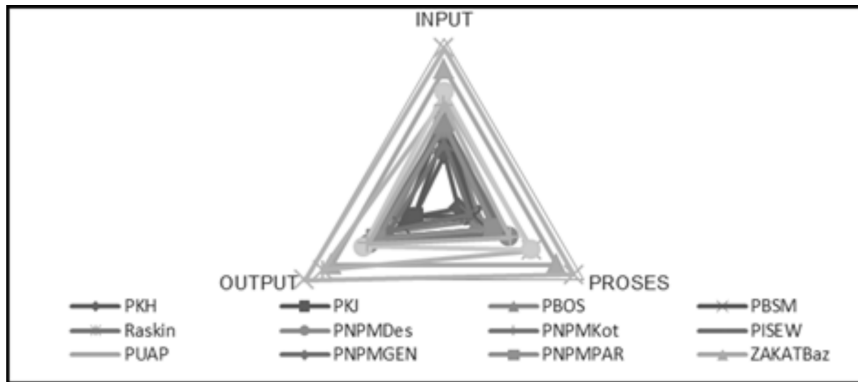
Hasil analisis yang menempatkan program zakat pada *good score* pada seluruh dimensi yang dianalisis, kemungkinan besar disebabkan oleh tepatnya lembaga zakat dalam merancang program sehingga sesuai dengan kebutuhan dan waktu diperlukannya program tersebut. Persyaratan bagi penerima program zakat yang tidak sulit, sifat program yang komprehensif antara program bantuan sosial dan program pemberdayaan, menjadi keunggulan bagi program zakat. Demikian pula terkait dengan model perencanaan yang diterapkan. Model perencanaan program tidak selalu harus menerapkan konsep *bottom up* yang sering justru tidak efektif dalam kasus kemiskinan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh si miskin dalam memahami permasalahannya sendiri. Hal ini menjadi dasar bagi lembaga zakat untuk menggabungkannya dengan konsep *top down* dengan tetap mendengar dan memerhatikan aspirasi dari calon penerima program, sehingga *integrated approach* menjadi pendekatan yang efektif. Proses pendampingan yang dilakukan secara intensif oleh personil yang secara fisik tinggal di lokasi si miskin pada program zakat Dompot Dhuafa, juga menjadi

faktor yang sangat menentukan keberlanjutan program zakat. Tingkat pemahaman tenaga pendamping dan kepercayaan si miskin terhadap pendamping yang dikenal sebagai tetangga menjadi motivasi bagi penerima program untuk memiliki keterlibatan yang tinggi dalam pelaksanaan program.

Mekanisme penentuan penerima program dengan menggunakan penilaian tetangga terdekat sebagai sumber informasi utama selain data statistik kependudukan, juga menjadi faktor yang menentukan program zakat berada pada kategori *good score* khususnya pada dimensi *output*. Khusus pada Dompot Dhuafa, fokus lembaga ini untuk mengembangkan pembentukan lembaga masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program dalam memandirikan si miskin.

Terkait dengan hasil analisis terhadap program pemerintah yang menempatkan seluruh program di antara *good* dan *bad score*, kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah terhadap mekanisme pelaksanaan program yang sebenarnya telah ditetapkan secara baik. Hasil penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang kelemahan program pemerintah, yaitu rendahnya koordinasi antarpihak dalam pelaksanaan program sehingga program-program berjalan sendiri-sendiri. Kelemahan lainnya, adalah: mekanisme perencanaan *bottom up* yang sering hanya kamuflase di mana pejabat berwenang mulai dari tingkat Rukun Tetangga lebih dominan dan mengabaikan ide-ide program dari bawah. Selain itu perihal ketidaktepatan penyaluran program, faktor-faktor tersebut menjadi penyebab rendahnya status keberlanjutan program pemerintah.

Sementara pada program CSR yang berada di antara skor *good* dan *bad*, lebih disebabkan terbatasnya kapasitas. Dalam berbagai aspek, program-program CSR relatif efektif namun mengingat keterbatasan kapasitas dalam personil



**Gambar 5.** Diagram Layang *Sustainability Analysis* antara Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah, Zakat, dan CSR

dan orientasi program yang berfokus pada sekitar wilayah operasi perusahaan menjadikan program-program CSR cenderung eksklusif. Selain itu, regulasi yang relatif sering berubah sangat memengaruhi operasionalisasi program-program CSR yang pada gilirannya menentukan efektivitasnya.

Keragaan status keberlanjutan dari tipe program yang dianalisis dapat dilihat pada diagram layang-layang pada Gambar 5 yang menggambarkan keterkaitan antardimensi yang dianalisis. Diagram layang menunjukkan bahwa program-program yang berada pada bagian luar diagram menunjukkan skor baik (100 persen) sementara program-program yang berada pada bagian dalam menunjukkan skor buruk (0 persen). Dari Gambar 5 terlihat bahwa program Zakat Dompot Dhuafa berada pada garis terluar diikuti oleh program CSR dan program-program pemerintah pada bagian dalam.

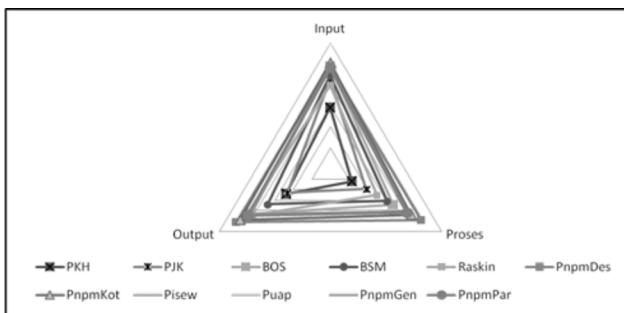
Keragaman antarprogram juga terjadi di antara program yang diselenggarakan oleh lembaga yang sama, sebagaimana terlihat pada Gambar 6 sampai 8. Gambar 6 sampai 8 menunjukkan analisis keberlanjutan jika analisis difokuskan pada masing-masing penyelenggara program. Pada Gambar 6 yang menganalisis program pemerintah, menunjukkan bahwa seluruh program PNPM berada pada garis terluar dibandingkan dengan program yang sifatnya

bantuan sosial, yang berarti program yang bersifat pemberdayaan mempunyai status keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan dengan program yang bersifat bantuan sosial.

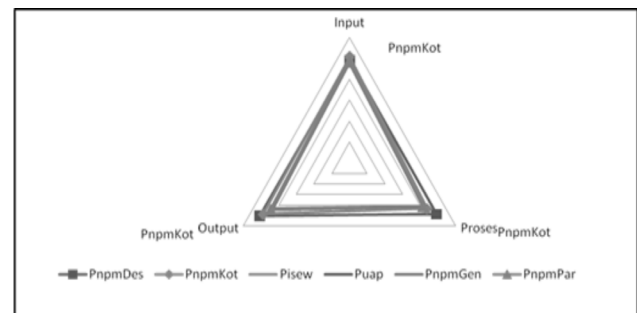
Jika analisis difokuskan secara lebih rinci dengan membedakan antara program yang bersifat pemberdayaan dan program yang bersifat bantuan sosial, maka PNPM Perkotaan berada pada skor yang lebih baik dibandingkan program PNPM yang lain khususnya pada dimensi *input* dengan status kurang berlanjut. Sedang pada dimensi proses, PNPM perdesaan mempunyai skor lebih baik dengan status keberlanjutan yang sama. Hasil analisis sebagaimana terlihat pada Gambar 7.

Pada program yang bersifat bantuan sosial, program Bantuan Operasional Sekolah dan program Raskin berada pada garis terluar diagram layang-layang yang menunjukkan skor keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan program lainnya (Gambar 8). Status keberlanjutan program bantuan sosial seluruhnya berada pada kelompok kurang berlanjut.

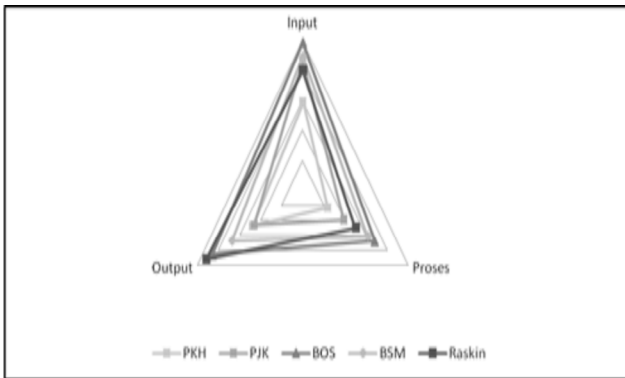
Pada program zakat sebagaimana terlihat pada Gambar 9, program Zakat Dompot Dhuafa berada pada garis terluar pada dimensi *input* dan proses yang menunjukkan status keberlanjutan yang lebih baik dibanding program zakat lainnya. Sedangkan pada dimensi *output* program Zakat *Maz Baitussalam* berada pada skor paling baik yang ditunjukkan oleh



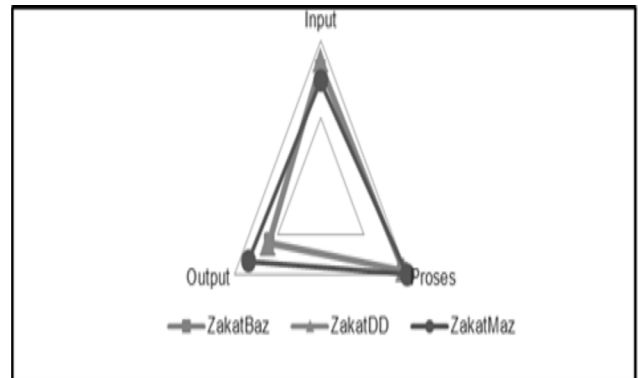
**Gambar 6.** Diagram Layang *Sustainability Analysis* Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah



**Gambar 7.** Diagram Layang *Sustainability Analysis* Program Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah



**Gambar 8.** Diagram Layang *Sustainability Analysis* Program Bantuan Sosial pada Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah



**Gambar 9.** Diagram Layang *Sustainability Analysis* Program Zakat

garis terluar. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketepatan penyaluran yang tinggi mengingat antara pengelola dan penerima berada pada area geografis yang dekat.

Pada program CSR (Gambar 10) program PT Antam berada pada garis terluar pada seluruh dimensi yang dianalisis, sehingga program CSR Antam berstatus lebih baik dibandingkan program CSR PT Pertamina. Keseriusan PT Antam mengelola program CSR ditunjukkan dengan adanya bagian khusus dari struktur organisasi program CSR yang lebih terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah *remote* operasi utama PT Antam. Pengelolaan CSR yang berlanjut hingga pascatambang juga menjadi sumber keunggulan program CSR PT Antam.

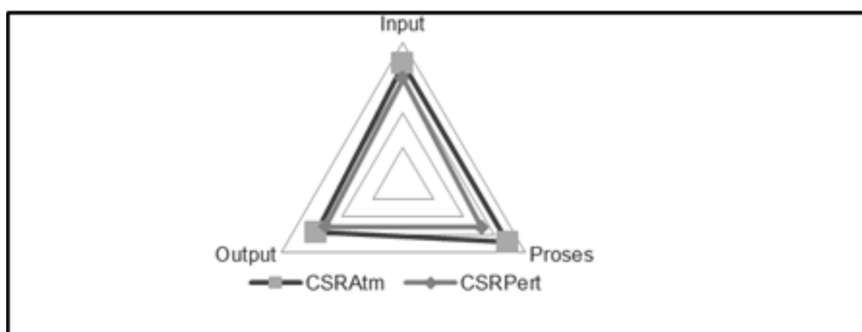
### B. Analisis Leverage

Analisis *leverage* merupakan analisis sensitivitas untuk mengetahui variabel atau atribut yang sensitif terhadap perubahan skor keberlanjutan (faktor pengungkit). Dengan mengetahui faktor pengungkit akan dapat diperkirakan tingkat sensitivitas suatu atribut terhadap skor keberlanjutan. Hasil analisis *leverage* terhadap dimensi *input*, *proses*, dan *output* program pengentasan kemiskinan disajikan pada Gambar 11.

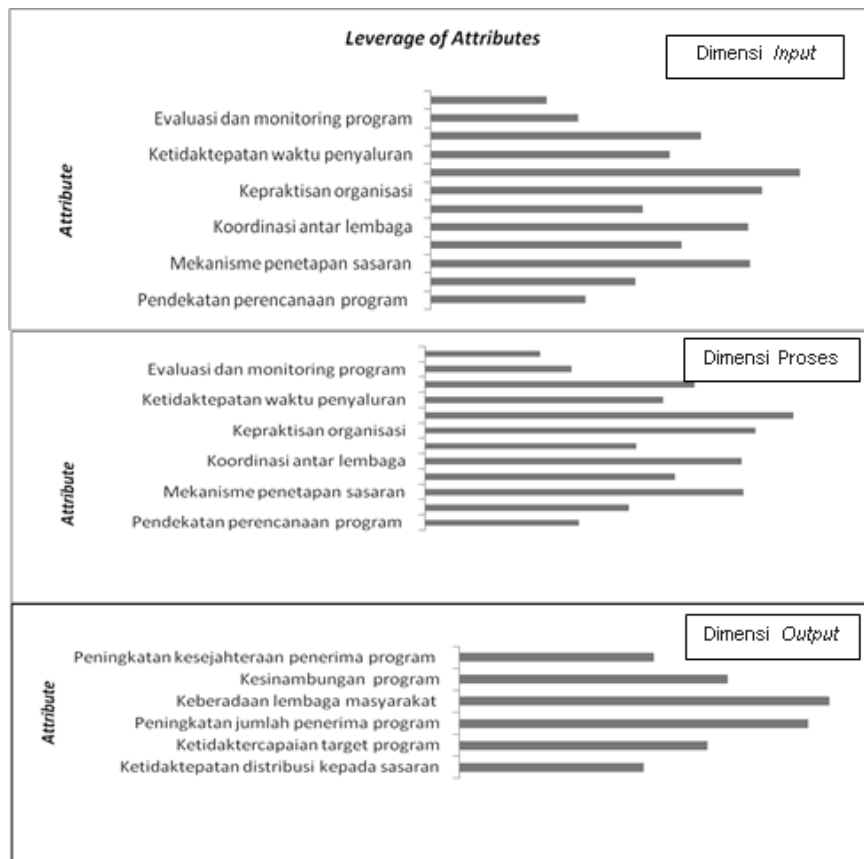
Dari dimensi *input*, atribut “perbedaan antarprogram; ketidaksesuaian program

dengan kebutuhan masyarakat sasaran, serta ketidakakuratan data memiliki pengaruh 3,33 persen melebihi atribut-atribut yang lain. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ketiga atribut berpengaruh sangat besar terhadap *sustainability* program pengentasan kemiskinan. Pada dimensi *proses*, atribut “biaya pengelolaan, mekanisme penetapan sasaran, kepraktisan organisasi serta koordinasi antarlembaga” merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap *sustainability* program pengentasan kemiskinan dibandingkan atribut lainnya. Atribut biaya pengelolaan menjadi faktor yang paling dominan pada dimensi *proses* dengan pengaruh sebesar 3,56 persen. Sedangkan pada dimensi *output*, atribut “keberadaan lembaga masyarakat” merupakan atribut yang berpengaruh paling besar terhadap *sustainability* program pengentasan kemiskinan dibanding atribut yang lain dengan pengaruh sebesar 5,63 persen.

Berdasarkan hasil analisis *leverage* tersebut, maka kebijakan yang berkaitan dengan aspek ketersediaan data dan keakuratan data, baik mengenai data penduduk miskin, data penerima program, maupun data hasil suatu program harus mendapat perhatian serius dari penentu kebijakan. Demikian juga kebijakan yang terkait dengan perbedaan antara suatu program dengan program lainnya. Kemiripan antara program satu dengan program lainnya tidak saja merupakan pemborosan



**Gambar 10.** Diagram Layang *Sustainability Analysis* Program CSR



**Gambar 11.** Analisis *Leverage* Atribut Penentu Skor Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan

terhadap penggunaan sumber daya, namun juga mendingungkan terutama bagi penerima program, sehingga tingkat keterlibatan mereka rendah, tidak merasa memiliki program dan kecenderungan perilaku penerima program apatis. Model pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS tidak cukup memadai mengingat dinamika kemiskinan yang tinggi. Kondisi ini telah diantisipasi oleh program zakat dengan melakukan pendekatan pengakuan sendiri dan penilaian dari tetangga terdekat untuk menentukan siapa yang disebut miskin dan tepat sebagai penerima program.

Terkait dengan faktor biaya pengelolaan yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap status keberlanjutan program pada dimensi proses, maka penentu kebijakan harus mengupayakan biaya seefisien mungkin. Sementara terkait dengan aspek ketepatan waktu penyaluran, penentu kebijakan harus memerhatikan waktu penyaluran program untuk menjamin penyaluran program sesuai dengan waktu di mana kebutuhan penerima muncul/terjadi. Selain itu penentu kebijakan harus menjamin adanya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses pelaksanaan program, untuk menjamin program terlaksana dengan optimal.

Lembaga masyarakat yang menggambarkan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan

permasalahan secara mandiri merupakan atribut yang mempunyai pengaruh paling kuat pada dimensi *output* program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Oleh karena itu penentu kebijakan harus memerhatikan aspek ini guna menjamin program mampu menghasilkan lembaga masyarakat yang menjadi wadah bagi pengembangan kemampuan masyarakat (miskin) untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri sehingga tidak tergantung kepada pihak lain.

Mencermati faktor-faktor *leverage* program pengentasan kemiskinan sangat perlu dilakukan oleh penentu kebijakan, dalam rangka meningkatkan status keberlanjutan program. Status keberlanjutan yang menggambarkan tingkat kemampuan program untuk bertahan dalam suatu rentang waktu yang panjang, terpelihara efektivitasnya, serta tumbuh dan berkembang kekuatannya menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Semakin baik status keberlanjutan suatu program, semakin baik kemampuan program dalam upaya pengentasan kemiskinan.

### C. Analisis Monte Carlo

Mengingat *Rappoverty* merupakan metode penilaian cepat, maka kemungkinan terdapat kesalahan/ketidaktelitian dalam analisisnya.

Ketidapastian tersebut terkait dengan (1) kesalahan skoring akibat minimnya informasi, (2) variasi dalam skoring akibat perbedaan penilaian, dan (3) kesalahan dalam memasukkan data. Dengan menyadari bahwa faktor-faktor tersebut sangat besar berpengaruh terhadap kepastian model, maka dilakukan analisis Monte Carlo. Analisis Monte Carlo akan menguji dampak dari kesalahan acak (*random error*) terhadap model. Dalam studi ini analisis Monte Carlo dilakukan dengan metode “*scatter plot*” untuk menunjukkan perubahan ordinasi dari setiap dimensi. Hasil analisis Monte Carlo yang dilakukan dengan 30 kali pengulangan menunjukkan bahwa model program pengentasan kemiskinan pemerintah, zakat, dan CSR yang menghasilkan status keberlanjutan sebagaimana diuraikan pada sesi sebelumnya adalah telah dapat mengantisipasi adanya *random error* sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan terlihat dari plot yang berpola sama dengan analisis sebelumnya. Hasil analisis Monte Carlo diwakili oleh Gambar 12.

#### D. Analisis Kelayakan Model

Analisis terhadap kelayakan model (*good of fit*) dilakukan untuk menentukan perlu tidaknya penambahan atribut pada model dan menguji akurasi model dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil analisis kelayakan model dapat dilihat dari nilai *stress* (S) dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Pada dimensi *input* diperoleh nilai S sebesar 0,18 dan nilai  $R^2$  sebesar 0,89. Pada dimensi proses diperoleh nilai S sebesar 0,16 dan nilai  $R^2$  sebesar 0,92. Pada dimensi *output* diperoleh nilai S sebesar 0,22 dan nilai  $R^2$  sebesar 0,88. Sesuai dengan kaidah analisis kelayakan model yang disampaikan oleh Fauzi dan Anna (2005), bahwa model yang baik ditunjukkan dengan nilai S yang lebih kecil dari 0,25, maka model penelitian ini dikatakan baik (*good fit*). Demikian pula jika dilihat dari nilai  $R^2$  yang mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak perlu dilakukan penambahan atribut pada model untuk mendekati keadaan yang sebenarnya.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

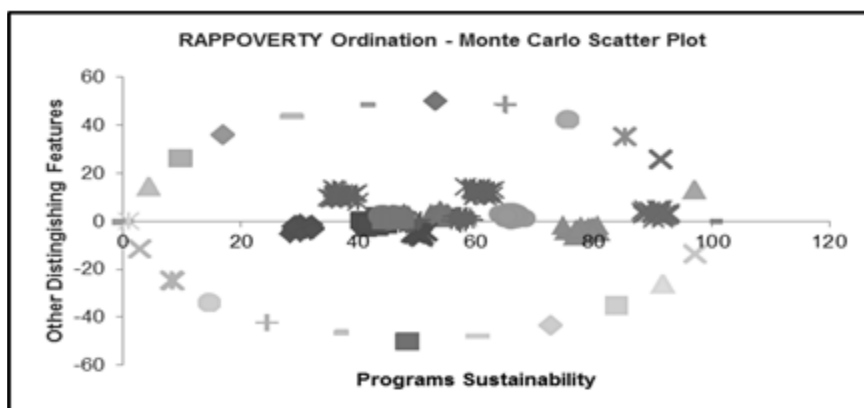
### A. SIMPULAN

Mengetahui status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan adalah penting untuk menentukan tingkat kinerja pengelolaan program maupun tingkat kemanfaatan program. Berdasarkan hasil analisis *Rappoverty*, dapat disimpulkan bahwa status keberlanjutan antara program pemerintah, program zakat, dan program CSR bervariasi namun cukup konsisten. Pada seluruh dimensi yang dianalisis meliputi dimensi *input*, proses, dan *output*, program pengentasan kemiskinan berbasis zakat mempunyai status keberlanjutan paling baik dibandingkan program pemerintah maupun program CSR. Program-program zakat memiliki status sangat berlanjut, sementara program CSR memiliki status cukup berlanjut, sedangkan program-program pemerintah mempunyai status kurang berlanjut.

Pada analisis *leverage* diketahui faktor-faktor yang menentukan status keberlanjutan (faktor pengungkit) program pengentasan kemiskinan pada masing-masing dimensi. Pada dimensi *input*, diketahui faktor yang menjadi pengungkit status keberlanjutan program adalah (1) perbedaan antarprogram, (2) keakuratan data, dan (3) ketersediaan data. Pada dimensi proses, yang menjadi faktor *leverage* adalah (1) biaya pengelolaan, (2) ketidaktepatan waktu penyaluran, dan (3) sinkronisasi program antarlembaga. Sedangkan pada dimensi *output* adalah (1) keberadaan lembaga masyarakat dan (2) peningkatan jumlah penerima program.

### B. Saran

Dari simpulan tersebut, hasil studi ini berimplikasi bagi penentu kebijakan program pengentasan kemiskinan dalam beberapa hal. Mengingat kemiskinan bersifat lintas antarwaktu dan antargenerasi, maka melakukan evaluasi untuk menentukan status keberlanjutan dan faktor yang memengaruhi keberlanjutan program



Gambar 12. Hasil Analisis Monte Carlo untuk Dimensi *Input*

penanggulangan kemiskinan sangat penting sebagai dasar dalam menyusun program yang berkelanjutan.

Untuk menghadapi kemiskinan yang multidimensional, maka dalam merancang program pengentasan kemiskinan perlu dikembangkan indikator yang lengkap dan menyeluruh baik yang bersifat *ex-ante* maupun *ex-post* sebagaimana tergambar pada dimensi *input*, proses, dan *output* pada penelitian ini. Selain itu juga, perlu ditetapkan parameter umum dan parameter khusus yang dapat diselaraskan sebagai indikator keberhasilan program. Misalnya model program zakat karena merupakan program berbasis aturan agama, program ini mempunyai mekanisme yang cukup berbeda dibandingkan dengan program lainnya. Namun demikian tetap dapat dipadukan dengan program lainnya. Misalnya pada penggunaan tetangga sebagai *informan* dalam menentukan sasaran program, dapat diselaraskan dengan data-data BPS yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan calon penerima program untuk menghindari kesalahan/ketidakakuratan dalam penyaluran program.

Studi ini dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan umpan balik (*feed back*) dan tindak lanjut (*feed forward*) program pengentasan kemiskinan. Dengan mendasarkan pada indeks status keberlanjutan program, penentu kebijakan dapat memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu program. Demikian pula, dengan mendasarkan pada faktor-faktor yang menjadi pengungkit (*leverage*) keberlanjutan program, ke depan dapat dirancang program pengentasan kemiskinan yang memastikan program efektif, untuk merealisasikan target-target pengentasan kemiskinan.

Sebagai metode pengambilan keputusan multikriteria, metode *Rappoverty* memiliki kelemahan dalam sifat analisisnya yang cepat sesuai dengan namanya (*rapid*) serta penggunaan kriteria/atribut yang kurang spesifik. Oleh karena itu, dalam kerangka penelitian yang lebih komprehensif, penelitian dengan metode *Rappoverty* perlu ditinjaulanjuti dengan menggunakan metode multikriteria yang lebih mendalam seperti misalnya metode *Promethee*, untuk menentukan urutan (*ranking*) kinerja program. Dengan mengetahui urutan kinerja, maka model pola program pengentasan kemiskinan dapat dirancang menuju kepada pola program yang berada pada *ranking* kinerja terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Blanden, J. and Gibbons, S. (2006). *The persistence of poverty across generations a view from two British cohorts*. Bristol: The Policy Press.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzi, A. dan Anna, S. (2005). *Pemodelan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk analisis kebijakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hersh, M. (2006). *Mathematical modelling for sustainable development*. Germany: Springer.

### Jurnal dan Working Paper

- Bradshaw, T. K. (2005). Theories of poverty and anti-poverty programs in community development. *RPRC Working Paper No. 06-05*. Diperoleh tanggal 14 September 2013, dari [vistacampus.gov/.../PovertyInAmerica/Theories\\_Pov\\_Anti\\_Pov\\_Pro](http://vistacampus.gov/.../PovertyInAmerica/Theories_Pov_Anti_Pov_Pro).
- Elsner, W. (2004). The 'new' economy; complexity, coordination and a hybrid governance approach. *International Journal of Social Economics*, 31(11/12), 1.029-1.049.
- Groenen, P. J. and Velden, M. (2004). Multidimensional scaling. *Econometric institute report EI 2004-15*. Diperoleh tanggal 18 April 2014, dari [repub.eur.nl/pub/1274/ei200415.pdf](http://repub.eur.nl/pub/1274/ei200415.pdf).
- Jaworska, N. and Anastasova, C. A. (2009). A review of multidimensional scaling (MDS) and its utility in various psychological domains. *Tutorials in quantitative methods for psychology*, 5(1), 1-10.
- Kavanagh, P. and Pitcher, T. (2004). Implementing microsoft excel software for raphish: A technique for the rapid appraisal of fisheries status. *Fisheries Centre Research Reports*, 12(2). Diperoleh tanggal 1 Oktober 2014, dari [www.fisheries.ubc.ca/webfm\\_send/188](http://www.fisheries.ubc.ca/webfm_send/188).
- Pitcher, T. J. and Preikshot, D. (2001). *RAPFISH: A rapid appraisal technique to evaluate the sustainability status of fisheries*. *Fisheries Research* 49, 255-270.

- Sell, M. and Spence, C. (2001). Summary report from the workshop of poverty alleviation and sustainability development. *Published by IISD*, 46(1), 1-6. Diperoleh tanggal 11 Desember 2014, dari [www.iatp.org/.../Summary\\_Report\\_from\\_the\\_Workshop\\_On\\_Poverty](http://www.iatp.org/.../Summary_Report_from_the_Workshop_On_Poverty)
- Shaffer, P. (2008). New thinking on poverty: Implications for globalisation and poverty reduction strategies. *DESA Working Paper No. 65 ST/ESA/2008/DWP/65*. Diperoleh tanggal 2 Januari 2015, dari [www.un.org/esa/desa/papers/2008/wp65\\_2008.pdf](http://www.un.org/esa/desa/papers/2008/wp65_2008.pdf).
- Williamson, O. E. (1991). Economic institutions: Spontaneous and intentional governance. *Journal of Law, Economic and Organization*, 7, 159-187.
- Sumber Digital**
- BPS. (2013). Data Strategis BPS 2013. Diperoleh tanggal 12 Maret 2014, dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- BPS. (2014). Data Kemiskinan Triwulan Pertama 2014. Diperoleh tanggal 12 Mei 2014, dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- BPS. (2015). Data Kemiskinan 2015. Diperoleh tanggal 12 September 2015, dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- World Development Report (2002). Diperoleh tanggal 15 Januari 2014, dari [web.worldbank.org ›Data & Research›Research›WDRs](http://web.worldbank.org/Data&Research/Research/WDRs).
- Sumber Lain**
- Dasgupta, P. (2003). World poverty: Causes and pathways. Paper presented at World Bank Conference on Development Economics, Washington, DC: World Bank. Diperoleh tanggal 12 Juli 2013, dari [users.ictp.it/~eee/workshops/smr1597/Dasgupta%20-%20POVERTY.pdf](http://users.ictp.it/~eee/workshops/smr1597/Dasgupta%20-%20POVERTY.pdf).
- Dasgupta, P. (2007). Poverty trap-exploring the complexity of causation. 2020 focus brief on the world's poor and hungry people. Diperoleh tanggal 12 Juli 2013, dari <https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/37194/1/127842.pdf>.
- Dolles, V. (2010). Analisis kelembagaan dalam pengembangan program untuk pemberdayaan masyarakat miskin kota (Studi kasus penanggulangan kemiskinan di kota Depok). Skripsi. Diperoleh tanggal 12 Juli 2014, dari [repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62703](http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/62703).
- Fauzi, A. (2012). Model pemberdayaan masyarakat. Disampaikan pada seminar pemberdayaan masyarakat desa hutan. Bandung 27 September 2012.
- Hasan, M. K. (2010). An integration poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. *Presented in Seventh International Conference-The Tawhidi Epistimology: Zakat and Waqf Economy, Bangi*. Diperoleh tanggal 1 April 2013, dari [www.researchgate.net/.../228889744\\_AN\\_INTEGRATED\\_POVERTY\\_AL](http://www.researchgate.net/.../228889744_AN_INTEGRATED_POVERTY_AL).
- Muktazam dan Nurjanah, S. (2011). Kajian kritis atas fenomena dan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan di pulau Lombok. Laporan penelitian.
- Mutamimah dan Hartono, S. (2010). *Holistic approach* sebagai model optimalisasi program corporate social responsibility dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Laporan penelitian.
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, PSPK UGM, dan Ford Foundation. (2014). *Press Release*. Hasil evaluasi penelitian efektivitas program pengentasan kemiskinan di 15 kabupaten/kota di Indonesia. Diperoleh tanggal 11 Desember 2014, dari [www.academia.edu/.../Tinjauan\\_Terhadap\\_Efektivitas](http://www.academia.edu/.../Tinjauan_Terhadap_Efektivitas).
- Septiana dan Darwis, V. (2004). Keefektifan koordinasi kelembagaan dan strategi penanggulangan kemiskinan di daerah. *Disampaikan pada seminar strategi penanggulangan kemiskinan di daerah*. Diperoleh tanggal 5 Oktober 2013, dari [pse.litbang.pertanian.go.id/ind/.../Mono25-03.pdf](http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/.../Mono25-03.pdf).
- Simon, H. and Fredrik, L. (2009). CSR in Indonesia a qualitative study from a managerial perspective regarding views and other important aspects of CSR in Indonesia Program: IBR-06. Höskolan Gotland: VT. Thesis. Diperoleh tanggal 5 Oktober 2013, dari [www.diva-portal.org/smash/get/diva2:240404/FULLTEXT01.pdf](http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:240404/FULLTEXT01.pdf).
- The Economist. Special report: Corporate social responsibility. Just good business. *The Economist* Ed. Jan 17<sup>th</sup> 2008. Diperoleh tanggal 2 Oktober 2013, dari [www.economist.com/node/10491077](http://www.economist.com/node/10491077).

**Lampiran 1. Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah, Zakat, dan CSR**

Program Pemerintah		Program Zakat Baznas		Program Zakat Dompot Dhuafa		Program Zakat MAZ Baitussalam		Program CSR PT Antam	Program CSR Pertamina
Program Bantuan Sosial	Program Pemberdayaan Masyarakat	Konsumtif	Produktif	Konsumtif	Produktif	Konsumtif	Produktif		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Program Keluarga Harapan</li> <li>Program Jaminan Kesehatan Masyarakat</li> <li>Program Bantuan Siswa Miskin</li> <li>Bantuan Operasional Sekolah</li> <li>Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</li> <li>PNPM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PNPM Perdesaan Harapan</li> <li>PNPM Perkotaan</li> <li>PNPM Infrastruktur Sosial</li> <li>PNPM Ekonomi Wilayah (PISEW)</li> <li>PNPM Peningkatan Usaha Pertanian (PUAP)</li> <li>PNPM Pariwisata</li> <li>PNPM Generasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konter Layanan Mustahik</li> <li>Program Tanggap Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zakat Community Development Program (Integrasi aspek pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya).</li> <li>Ekonomi: Rumah Makmur Baznas</li> <li>Kesehatan: Rumah Sehat Baznas</li> <li>Pendidikan: Rumah Cerdas Anak Bangsa</li> <li>Sosial: Rumah Dakwah Baznas</li> </ol>	<p>Program Tematik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ramadhan: Pasar Berkah; Gerakan Masjid Sehat; Neo Festival Kampung Sehat</li> <li>Kurban: Tebar Hewan Kurban</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>SMART Ekselensia Indonesia</li> <li>FIS Filial</li> <li>Sekolah Guru Indonesia</li> <li>Beastudi Indonesia</li> <li>Makmal Pendidikan Institut Kemandirian Kampus Umar Usman</li> </ul> </li> <li>Kesehatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma</li> <li>Rumah Sehat Terpadu</li> <li>Ekonomi: Pertanian Sehat Indonesia</li> <li>Kampoeng Ternak Nusantara</li> <li>Karya Masyarakat Mandiri</li> </ul> </li> <li>Sosial:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Pelayanan Masyarakat</li> <li>Migrant Institute</li> <li>Disaster Management Centre</li> <li>Semesta Hijau</li> </ul> </li> </ol>	<p>Bantuan Langsung (Charity)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kesehatan: Layanan Kesehatan Cuma-Cuma/Pos Sehat</li> <li>Ekonomi: Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa</li> <li>Bantuan Pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ekonomi: Program Kemitraan</li> <li>Sosial:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan &amp; Pelatihan</li> <li>Kesehatan</li> <li>Infrastruktur</li> <li>Pelestarian Budaya</li> <li>Bina Lingkungan</li> <li>Pengembangan Masyarakat</li> </ul> </li> <li>Pelestarian Alam:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Foundation</li> <li>OSN</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertamina dan Pendidikan</li> <li>Pertamina dan Keselamatan</li> <li>Pertamina dan Pendidikan</li> <li>Pertamina dan Lingkungan</li> <li>PKBL</li> <li>Foundation</li> <li>OSN</li> </ol>

Sumber: Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K, 2014; [www.pnpm-mandiri.org](http://www.pnpm-mandiri.org); Buletin Maz Baitussalam 2014; Company Profile Dompot Dhuafa, 2014; Laporan Keberlanjutan PT Antam, Tbk, 2011, 2013, [www.Antam.com](http://www.Antam.com); dan [www.Pertamina.com](http://www.Pertamina.com).

**Lampiran 2. Dimensi, Atribut, dan Kriteria Evaluasi Keberlanjutan Program Penanggulangan Kemiskinan**

Dimensi /Atribut			Kriteria			
Dimensi	No.	Atribut	Score	Good	Bad	Keterangan
Input	1.	Kriteria penerima	0, 1, 2, 3	3	0	Tidak ada (0), Ada tetapi kurang jelas (1), Jelas-tidak diimplementasikan (2), Jelas dan diimplementasikan (3)
	2.	Tingkat kerumitan persyaratan penerima program	0,1,2	0	2	Rendah (0), Sedang (1), Tinggi (2)
	3.	Sumber dana	1, 2, 3	3	1	Terbatas (1), Cukup (1), Banyak (3)
	4.	Ketersediaan dana	0,1,2	2	0	Kurang (0), Cukup (1), Lebih dari cukup (2)
	5.	Ketersediaan data	0,1, 2	2	0	Kurang (0), Cukup (1), Tersedia dengan baik (2)
	6.	Ketidakkuratan data	0, 1, 2	0	2	Rendah (0), Sedang (1), Tinggi (2)
	7.	Ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sasaran	0, 1, 2	0	2	Rendah (0), Cukup (1), Tinggi (2)
	8.	Perbedaan antarprogram	0, 1, 2	2	0	Tidak berbeda (0), Cukup berbeda (1), Sangat berbeda (2)
	9.	Sifat Program	0, 1, 2	2	0	Komplementari (0), Parsial (1), Komperehensif (2)
	10.	Kestabilan regulasi	0, 1, 2	0	2	Rendah (0), Cukup Stabil (1), Tinggi (2)
	11.	Kapabilitas personil pelaksana	1, 2,3	3	1	Kurang (1), Cukup (2), Sangat Kapabel (3)
	12.	Pemahaman peserta terhadap program	0, 1, 2, 3	3	0	Sangat Rendah (0), Kurang (1), Cukup (2), Baik (3)
Proses	1.	Pendekatan perencanaan program	0, 1, 2	2	0	Top down (0), Bottom up (1), Partisipatif (2)
	2.	Keterlibatan masyarakat dalam penentuan sasaran/progam	0,1,2,3	3	0	Sangat kurang (0), Kurang (1), Cukup (2), Tinggi (3)
	3.	Mekanisme penetapan sasaran	0, 1, 2	2	0	Tidak ada (0); Ada tetapi tidak dipergunakan dengan baik, (1), Ada dan dipergunakan dengan baik (2)
	4.	Pendekatan program	0, 1, 2	2	0	Bantuan sosial langsung (0), Pemberdayaan (1), Komperehensif (2)
	5.	Koordinasi antarlembaga	1, 2, 3	3	1	Ada-tetapi kurang memadai (1), Ada-cukup memadai (2), Sangat memadai (3)
	6.	Sosialisasi dan edukasi	0,1, 2, 3	3	0	Tidak ada (0), Ada-tidak efektif (1), Ada-efektif (2), Sangat efektif (3)
	7.	Organisasi	0, 1, 2	2	0	Birokratif (0), Tidak Jelas (1), Orientasi tujuan (2)
	8.	Biaya pengelolaan	0, 1, 2	0	2	Rendah (0), Sedang (1), Tinggi (2)
	9.	Ketidaktepatan waktu penyaluran	0, 1, 2	0	2	Rendah (0), Sedang (1), Tinggi (2)
	10.	Berkurangnya jumlah dana yang disalurkan selama proses penyaluran	0,1, 2	0	2	Tidak ada (0), Kadang-kadang (1) Ada (2)
	11.	Evaluasi dan monitoring program	0, 1, 2, 3	3	0	Tidak ada (0), Ada tetapi tidak memadai (1), Ada-cukup memadai (2), Sangat memadai (3)
	12.	Governance	0, 1, 2,3	3	0	Kurang (0), Cukup (1), Baik (2), Sangat baik (3)
Output	1.	Ketidaktepatan distribusi kepada sasaran	0, 1, 2	0	2	Rendah (0), Sedang (1), Tinggi (2)
	2.	Ketidaktercapaian target program	0, 1, 2	0	2	Rendah (0), Sedang (1), Tinggi (2)
	3.	Peningkatan jumlah penerima program	0, 1, 2, 3	3	0	Sangat kurang (0) , Kurang (1), Cukup (2), Baik (3)
	4.	Keberadaan lembaga masyarakat	0, 1, 2, 3	3	0	Tidak bertambah (0), Ada penambahan sedikit (1), Bertambah sesuai target (2), Bertambah lebih dari target (3)
	5.	Kesinambungan program	0, 1, 2, 3	3	0	Sangat tidak pasti (0), Tidak pasti (1), Kurang (2), Berkesinambungan (3)
	6.	Peningkatan kesejahteraan penerima program	0, 1, 2	2	0	Tidak (0), Cukup (1), Baik (2)